

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
DIMODERASI OLEH *CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY***

Rahmi Zainal

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya km 12,5 simpang baru-Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari: ukuran dewan direksi; proporsi komisaris independen; jumlah komite audit; jumlah komite nominasi dan remunerasi; jumlah komite manajemen resiko; komposisi kepemilikan institusional dan komposisi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh CSR.

Penelitian ini melibatkan 8 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder setiap perusahaan selama 4 tahun secara time series. Analisis data menggunakan teknik uji interaksi yaitu Moderated Regression Analysis.

Hasil pengujian terhadap ukuran Dewan Direksi, jumlah Komite Manajemen Resiko, dan komposisi Kepemilikan Manajerial menunjukkan ada pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Proporsi Komisaris Independen, jumlah Komite Audit, jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi, serta komposisi Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pertambangan.

Kata Kunci : ROE, GCG, CSR.

PENDAHULUAN

Kinerja perusahaan merupakan hasil (output) yang diperoleh suatu perusahaan yang berasal dari berbagai alternatif keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kinerja perusahaan menggambarkan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Abdurrahman (2008) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan perusahaan dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Evaluasi nilai perusahaan dapat dilakukan untuk mengambil berbagai keputusan investasi (termasuk kredit) yang harus dilakukan pada saat ini. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. Keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam *corporate performance* (kinerja perusahaan) merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme *corporate governance* yang tepat.

Corporate governance telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti pada saat sekarang ini. Hal ini karena meningkatnya kebutuhan untuk menerapkan *good corporate governance* yang disuarakan secara global. Bahkan Wolfhenson dalam Pamudji (2008) menyebutkan bahwa *corporate governance* yang buruk juga disebutkan sebagai salah satu penyebab dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia Timur pada tahun 1997-1998, termasuk di Indonesia. Menurut Darmawati, (2006) ciri utama dari *corporate governance* yang buruk adalah adanya tindakan dari menejer perusahaan yang mementingkan dirinya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan investor, dimana ini akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang return atas investasi yang mereka harapkan.

Hubungan menejer dengan pemegang saham di dalam *agency theory* digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Jenssen dan Meckling dalam Siallagan, 2006). Menejer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Menejer harus mengambil keputusan bisnis terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil menejer adalah memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Namun demikian pemegang saham tidak dapat mengawasi semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh menejer. Suatu ancaman bagi pemegang saham jika menejer akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Dalam hal ini diperlukan adanya Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko.

GCG terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, menejer, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).

GCG juga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme yang membantu perusahaan dalam menegakkan hukum dan peraturan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Salah satu fokus utama dari tata kelola ini adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara benar dan *akuntable*, dengan penekanan kuat pada pencapaian tujuan yang efektif dan kelangsungan hidup organisasi/perusahaan dalam jangka panjang.

Penelitian Gunarsih yang dikutip dalam Darmawati, dkk. (2004), dan penelitian Herawaty (2008), membuktikan bahwa variabel CG berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja perusahaan. Melalui laba yang diperoleh dalam operasionalnya, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Namun dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hambatan yang akan dihadapi perusahaan, dimana hambatan tersebut pada umumnya bersifat fundamental. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik (*good corporate governance*), yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka yakin terhadap perolehan keuntungan dari investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Dari sinilah, nampak bahwa penerapan GCG sangatlah diperlukan, terutama untuk perusahaan besar yang operasionalnya tersebar di beberapa lokasi, seperti perusahaan pertambangan.

Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang melibatkan banyak pihak. Selain dimiliki oleh perseorangan sebagai pemegang saham mayoritas juga menempatkan sahamnya di pasar (Bursa Efek). Terhadap struktur kepengurusan perusahaan ini memiliki unsur-unsur manajemen yang komplis pada berbagai bidang manajemen. Perusahaan pertambangan sendiri menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia, sektor pertambangan menjadi pemicu pertumbuhan sektor lainya dan menyediakan kesempatan kerja 34 ribu tenaga kerja langsung (<http://www.esdm.co.id>).

Secara eksternal, perusahaan bidang pertambangan juga sangat terlibat langsung dengan lingkungan yang ada. Ketika perusahaan pertambangan menjadi sektor yang sangat penting ada hal lain yang harus di perhatikan yaitu bahwa perusahaan pertambangan beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang tidak terbarukan Keterlibatan lingkungan ini, selain lingkungan alam, juga masyarakat yang baik secara langsung ataupun tidak akan terkena dampak dari aktifitasnya sehingga bisa muncul dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Kinerja atau perfoma yang baik adalah salah satu indikator yang dapat diandalkan di dalam mekanisme pasar dan hal ini dapat dicapai dengan implementasi prinsip *Good Corporate Governance*. CSR dan GCG seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena kedua-duanya merupakan hal yang penting. GCG dan CSR bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. CSR merupakan aplikasi dari prinsip *responsibility*, di samping prinsip-prinsip *transparancy*, *accountability*, *fairness* dan *independency*.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan hubungan antara GCG dengan CSR diantaranya dilakukan oleh Barnae dan Rubin (2005), Murwaningsari (2009), Utami dan Rahmawati (2010), Nurkhin (2010), Febriana dan Suaryana (2012). Hasil penelitian-penelitian tersebut masih belum konsisten sehingga hubungan antara GCG dan profitabilitas dengan pengungkapan CSR dalam penelitian tersebut belum dapat disimpulkan secara konklusif. Ramdhaningsih (2013) mengatakan GCG dan CSR merupakan dua fenomena yang saling berhubungan. Perusahaan harus meningkatkan kepatuhan perusahaan dengan hukum dan mengembangkan kebijakannya dalam rangka pelaksanaan aktivitas CSR. Perusahaan diharapkan menjalankan bisnisnya dengan baik untuk memaksimalkan profit. Ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR. Hal ini mendukung penelitian Rustiarini (2009), yang menyatakan struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) merupakan salah satu faktor GCG yang berpengaruh untuk pelaksanaan CSR.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari :

1. Ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
2. Proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
3. Jumlah komite audit terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
4. Jumlah komite nominasi dan remunerasi terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
5. Jumlah komite manajemen resiko terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

6. Komposisi kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
7. Komposisi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Kinerja merupakan capaian atau hasil akhir dari suatu proses dan sistem manajemen. Sebuah sistem pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu yang formal, prosedur dan rutinitas yang berbasis pada informasi yang digunakan manajer untuk mempertahankan atau merubah pola di dalam aktivitas perusahaan (Simons, 2013). Salah satu dari karakter dari sistem pengukuran kinerja yang efektif, yang dapat meningkatkan tujuan perusahaan, adalah harus dihubungkan dengan tujuan dan strategi perusahaan, dan juga karakter dari perusahaan (Chenhall dalam Widodo dan Catur, 2011).

Kinerja keuangan perusahaan adalah performance atau perkembangan total perusahaan yang menunjukkan hasil dari kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut selama periode tertentu. Atau dapat juga di artikan bahwa kinerja keuangan adalah penampilan dari perkembangan posisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu (Brigham dan Houston, 2006). Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan di mana Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Harahap, 2007).

Dari rasio keuangan yang ada, hanya kelompok rasio profitabilitas digunakan karena profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir atau laba dari sejumlah kebijakan dan keputusan-keputusan perusahaan (Riyanto, 2011). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk memproyeksikan kinerja keuangan digunakan rasio ROE yang terkait erat dengan GCG dengan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengolah aset dan juga modal dalam memperoleh laba. Return On Equity (ROE). ROE atau tingkat pengembalian equitas, menerangkan laba bersih yang di hasilkan untuk setiap equitas di mana semakin besar ROE menunjukkan semakin baik kesejahteraan pemegang saham prioritas yang di hasilkan dari setiap lembar saham (Tambunan 2007). Hasil penelitian yang di lakukan oleh Juliawati, (2014) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang di ukur dengan Return On Asett, Return On Equity dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Bank Dunia mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan menejer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah terjadi penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Sementara Syakhroza dalam Sholihin (2010) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pada praktiknya, efektivitas penerapan *good corporate governance* sangat berkaitan erat dengan kemampuan masing-masing organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Penilaian GCG dapat dilakukan dengan melihat kepada karakteristik GCG yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Sebagian karakteristik GCG yang dapat dinilai menurut Efendi (2009) adalah: Ukuran Dewan Direksi; Komisaris Independen; Komite Audit; Komite Pemantau Resiko; Komite Nominasi dan Remunerasi; Kepemilikan Menejerial; Kepemilikan Institusional.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan. Perusahaan dengan CG yang lebih baik mempunyai penilaian pasar yang lebih tinggi. Hasil ini ditunjukkan dengan temuan Gompers, dkk (2001) yang menemukan bahwa di Amerika Serikat perusahaan dengan CG yang lebih lemah secara relatif mempunyai laba yang lebih rendah. Darmawati, dkk. (2006) menemukan bahwa CG secara statistik signifikan mempengaruhi kinerja operasi perusahaan yang diproksi dengan ROE, tetapi CG belum mampu mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang diproksi dengan Tobins'q. Hal ini mungkin dikarenakan respon pasar terhadap implementasi CG tidak bisa secara langsung akan tetapi membutuhkan waktu.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Restuningdiah (2010) mengatakan bahwa pengungkapan CSR merupakan signal perusahaan untuk menyampaikan adanya *good news* kepada masyarakat sehingga dapat berpengaruh kepada perusahaan.

Semakin baik perusahaan mengolah ekuitas yang mereka miliki maka akan semakin baik juga keuangan perusahaan dan akan membuat perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kinerja sosial. Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Keharusan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan CSR di tegaskan pada Pasal 2 UU Minerba yang menegaskan bahwa: Pertambangan mineral dan/atau batu bara dikelola berasaskan: a) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Zeghal dalam Restuningdiah (2010), mengatakan bahwa perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan CSR memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan yang sedikit ataupun tidak mengungkapkan CSR, karena perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak kinerja sosialnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dana yang lebih untuk melakukan kinerja sosial. Dengan melihat kinerja sosial perusahaan yang baik, mencerminkan bahwa perusahaan mampu mengolah modal yang bersumber dari para investor dengan baik. Semakin baik perusahaan dalam mengolah ekuitas, semakin tinggi return yang akan diterima oleh para investor atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Adapun teknik untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria, yaitu :

1. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 dan tidak pernah delisting.
2. Menerapkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, yang tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
3. Terdapat laporan keuangan yang lengkap untuk tahun 2010-2013.
4. Menerapkan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan selama kurun waktu pengamatan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data historis yang diperoleh dari berbagai sumber melalui media perantara. Data sekunder tersebut meliputi buku referensi, literatur, data laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan perusahaan sampel yang diambil melalui website *www.idx.co.id* milik Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2013. Variabel penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* perusahaan tambang yang terdaftar dan dijadikan sampel penelitian.

Variabel independen (variabel bebas) pada penelitian ini adalah karakteristik dari *good corporate governance* yaitu :

- a. Ukuran Dewan Direksi (X_1)
- b. Proporsi Komisaris Independen (X_2)
- c. Jumlah Komite Audit (X_3)
- d. Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi (X_4)
- e. Keberadaan Komite Manajemen Risiko (X_5)
- f. Kepemilikan Institusional (X_6)
- g. Kepemilikan Manajerial (X_7)

Analisis data menggunakan uji interaksi yaitu Moderated Regression Analysis (MRA). Teknik ini merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Persamaan Regresi Moderasi dengan uji interaksi adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 X_8 + \beta_2 X_2 X_8 + \beta_3 X_3 X_8 + \beta_4 X_4 X_8 + \beta_5 X_5 X_8 + \beta_6 X_6 X_8 + \beta_7 X_7 X_8 + \epsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

H1 : Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil uji-t terhadap Ukuran Dewan Direksi menunjukkan nilai negatif, namun nilai berbeda didapat jika Ukuran Dewan Direksi dimoderasi oleh CSR, dimana nilainya adalah positif. Hal ini berarti bahwa jika Ukuran Dewan Direksi dipengaruhi oleh pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* akan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini, Dewan Direksi telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Dalam hal ini hipotesis pertama tentang Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi diterima.

H2 : Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Proporsi Komisaris Independen pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap Kinerja perusahaan namun tidak signifikan. Hasil uji-t menunjukkan nilai positif dengan signifikansi sebesar 0,288. Namun jika dimoderasi oleh pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility*, justru Proporsi Komisaris Independen tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan pertambangan. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua tentang Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi ditolak.

H3 : Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Secara perhitungan statistik Jumlah Komite Audit akan mempengaruhi Kinerja perusahaan, tetapi tidak signifikan. Namun jika data ini dianalisis dengan memperhitungkan *Corporate Sosial Responsibility*, maka hasil penghitungannya menjadi negatif atau Jumlah Komite Audit ini tidak memberikan pengaruh bagi perusahaan. Dapat dikatakan terhadap hipotesis ketiga dalam penelitian ini tentang Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi ditolak.

H4 : Jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Pengukuran terhadap variabel jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi menunjukkan adanya pengaruh terhadap pembentukan kinerja perusahaan berdasarkan laba bersih dan ekuitas perusahaan pertambangan. Pada penelitian ini, didapat nilai t hitung positif. Namun jika perhitungan keberadaan jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi ini dengan memperhitungkan pula pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* pada perusahaan pertambangan, maka keberadaan komite ini tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini hipotesis keempat tentang Pengaruh Jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi ditolak.

H5 : Komite Manajemen Resiko terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Perhitungan terhadap jumlah Komite Resiko Usaha tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun jika perhitungan faktor Komite Manajemen Resiko dimoderasi oleh *Corporate Sosial Responsibility*, maka diketahui bahwa jumlah Komite Manajemen Resiko akan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan. Pada penelitian ini hipotesis kelima tentang Pengaruh Jumlah Komite Manajemen Resiko terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi diterima.

H6 : Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Terhadap pengukuran dengan variabel komposisi Kepemilikan institusional, diketahui bahwa variabel ini mempengaruhi kinerja perusahaan pertambangan dengan signifikan dengan nilai t-hitung positif. Namun jika harus memperhitungkan dengan nilai *Corporate Sosial Responsibility* sebagai pemoderasi, ternyata komposisi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini hipotesis keenam tentang Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi ditolak.

H7 : Komposisi Kepemilikan Menejerial terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi

Pengukuran menunjukkan angka pengujian variabel komposisi Kepemilikan Menejerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun jika dengan memasukkan nilai *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi dalam perhitungan komposisi Kepemilikan Menejerial terhadap perolehan ROE perusahaan, maka komposisi Kepemilikan Menejerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan namun tidak signifikan. Dalam penelitian ini hipotesis ketujuh tentang Pengaruh Komposisi Kepemilikan Menejerial terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai variabel pemoderasi diterima.

KESIMPULAN

1. Hasil pengujian terhadap Ukuran Dewan Direksi, jumlah Komite Resiko Usaha, dan komposisi Kepemilikan Manajerial dengan memasukkan nilai CSR sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Proporsi Komisaris Independen, jumlah Komite Audit, jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi, serta komposisi Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Septyanto, D. 2008. Pengaruh Penerapan GCG dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2001-2005 di BEJ). *Jurnal Ekonomi FE-Universitas Indonusa Esa Unggul* . Vol 13 No. 1.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006, Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Jakarta.
- Barnae, Amir dan Amir Rubin. 2005. Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Shareholders. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.16, No 2
- Brigham, Eugene F and Huston, Joel F. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Buku 1. Penerjemah Ali Akbar Yulianto. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Darmawati, Deni, 2006, Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Forum Corporate Governance Indonesia, 2002. *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, FCGI.
- Herawaty, Vionola. 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable Dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Per 1 Juli 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Pamudji, Sugeng. 2008. Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Siallagan, Hamonagan & Mas'ud Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia. Jurnal Fokus Ekonomi. Vol. 1 No. 2 Desember 2006